

**KONSTRUKSI MENDUKUNG DAN MENINGKRITISI REALITAS  
PRABOWO SUBIANTO MENJADI MENTERI PERTAHANAN  
OLEH BERERAPA MEDIA *ONLINE***

Oleh

Sukarno<sup>1</sup> dan Pipiet Palestin Amurwani<sup>2</sup>

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

Jl. Kalimantan 37 Jember

<sup>1</sup>Surel: msukarno08@gmail.com

<sup>2</sup>Surel: pipietpalestin@gmail.com

**Abstract**

*As the only political opponent in the 2019 presidential election, Prabowo Subianto (PS) became the public spotlight after the election and the anugeration of Jokowi as the President of the Republic of Indonesia. The purpose of this study is to uncover the frames of online media in Indonesia concerning with the political news of PS becoming the Minister of Defense in the Kabinet Indonesia Maju (the second period of Jokowi's cabinet). The data were the corpus from the online media texts containing the supporting and criticizing frames constructed by the online media in relation to the political reality of PS becoming the Minister of Defense. Having been collected and sorted, the data were analyzed through a three-dimension theory of Fairclough's critical discourse analysis. The result shows that there are two types of frames constructed by the online media dealing with the political isu of PS becoming the Minister of Denfence. The supporting frame tends to claim that PS is the right person to occupy the position. In contrast, the criticizing frame tends to position PS as the person who approaches Jokowi because he really wants to occupy the political position. In addition, the study also reveals that the different frames are strongly influenced by the corporation of the media (owner's oreintation, the market orienttion, and the sosio-cultural practice of politics in Indonesia.*

**Keywords:** *the side, the interest, constructions, social reality, politics*

## Abstrak

Sebagai satu-satunya rival politik dalam Pemilu Presiden 2019, Prabowo Subianto (PS) menjadi perhatian publik pascapemilu dan dilantiknya Jokowi sebagai Presiden RI periode 2019–2024. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap sikap dan pandangan media *online* atas realitas politik tentang pelantikan PS menjadi Menteri Pertahanan pada Kabinet Indonesia Maju (Kabinet Jokowi periode kedua). Data penelitian berupa penggalan-penggalan teks yang menunjukkan sikap mendukung dan mengkritisi realitas politik dipilih dan dilantiknya PS sebagai Menhan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kritis dengan pendekatan analisis wacana kritis model Fairclough untuk memaparkan pendayagunaan perangkat kebahasaan (kosakata, modalitas, gramatika, dan pilihan narasumber berita) guna mengkonstruksi sikap dan pandangan media massa *online* terhadap wacana berita politik tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua bingkai yang dikonstruksi oleh media *online*, yaitu bingkai yang cenderung mendukung dan bingkai yang cenderung mengkritisi. Bingkai mendukung cenderung menempatkan PS sebagai orang yang dibutuhkan oleh negara (Presiden Jokowi), sebaliknya bingkai mengkritisi cenderung memosisikan PS sebagai orang yang mendekati Jokowi untuk memperoleh jabatan. Di samping itu, dapat pula ditafsirkan bahwa perbedaan sikap dan pandangan tersebut dipengaruhi oleh keberpihakan (pemilik) media massa terhadap korporasi mediana, kepentingan pasar, dan situasi perpolitikan di Indonesia.

**Kata Kunci:** keberpihakan, kepentingan, konstruksi, realitas sosial, politik

## A. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi, kehidupan masyarakat tidak dapat lepas dari kebutuhan informasi atau berita yang berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, berbagai media berlomba-lomba untuk menyajikan berita secara cepat atas suatu realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Demikian pentingnya penyebaran berita, maka media yang dapat menyediakan berita secara cepat akan lebih diminati oleh pembaca daripada jenis media lainnya (Sudaryanto dan Sulistyono 1997, 67). Salah satu media cepat yaitu media yang menyebarluaskan berita melalui jaringan internet (media *online*) karena jenis media ini dapat melayani khalayak dengan jangkauan yang luas dalam tempo yang

singkat. Media *online* (*online media*) adalah media massa yang tersaji secara *online* di situs web (*website*) internet (Romli 2015, 15). Keberadaan media *online* saat ini lebih banyak digunakan oleh masyarakat daripada media cetak karena fasilitas internet mudah dijangkau.

Secara ideal, media massa diharapkan bersifat netral dalam menyampaikan berita. Hal ini karena berita yang disajikan melalui media akan mudah menggiring opini publik dan memberikan citra tertentu atas suatu realitas. Namun pada kenyataannya, selalu ada kepentingan-kepentingan tertentu di balik suatu pemberitaan. Oleh karena itu, dianggap wajar apabila suatu realitas yang sama dapat dipahami secara berbeda jika hal itu dikonstruksi dengan bingkai berita yang berbeda. Pemberitaan suatu realitas atau dunia nyata bergantung pada bagaimana cara mengkonstruksi berita tersebut sesuai dengan kepentingan yang diinginkan. Suatu realitas tentang perlawanan terhadap penguasa (misalnya, Pangeran Diponegoro terhadap pemerintah Belanda di Indonesia) dapat dikonstruksi sebagai pahlawan oleh bangsa Indonesia atau sebagai pemberontak oleh bangsa Belanda bergantung pada kepentingan media yang memberitakannya.

Dalam praktik berwacana pada media massa, pemingkai berita merupakan suatu upaya mendayagunakan bahasa untuk merepresentasikan sikap atau pandangan suatu media atas isu atau realitas sosial tertentu yang terjadi di masyarakat. Sikap media dalam membingkai suatu berita (realitas sosial) dapat diungkap melalui teori tiga dimensi analisis wacana kritis model Norman Fairclough (1996, 24–26; 2010, 98) yang mencakup tataran analisis kebahasaan (*text analysis*), penginterpretasian praktik kewacanaan (*discursive practice*), dan penjelasan faktor sosial-budaya (*socio-cultural practice*) yang melatarbelakangi pemingkai suatu realitas sosial dalam media. Analisis kebahasaan untuk membingkai berita dimungkinkan karena bahasa yang awalnya hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, ekspresif keindahan dan fungsi direktif (Leech 2014, 78), kini telah berkembang sebagai sarana yang dapat digunakan untuk memengaruhi pihak lain karena bahasa memiliki daya dorong (Sukarno 2013) atau “*language has power*” (Fairclough 1996, 43). Oleh karena itu, ketika ada peristiwa politik yang menyita perhatian publik karena menimbulkan opini pro dan kontra, seperti dilantiknya Prabowo

Subianto (PS) sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) pada Kabinet Indonesia Maju, media massa berlomba-lomba untuk memberitakannya. Sikap media yang pro terhadap pengangkatan PS sebagai Menhan akan berusaha memengaruhi pembaca untuk mendukung dan memosisikan PS sebagai orang yang dibutuhkan oleh negara. Sebaliknya, media yang kontra mengkonstruksi realitas tersebut untuk memengaruhi pembaca dalam rangka mengkritisi peristiwa politik tersebut dengan cara memosisikan PS sebagai insan yang mengejar jabatan semata.

Berkaitan dengan pembingkaiian isu politik di media massa, beberapa studi telah dilakukan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mayasari, Damayanti, dan Riyanto (2013) tentang konstruksi berita pertentangan DPR dengan KPK mengenai pembangunan gedung baru KPK, yang dikonstruksi oleh *Media Indonesia* dengan judul “*Reporting on Saweran for KPK Building*”. Studi ini bertujuan untuk membongkar maksud yang tersembunyi di balik bingkai berita tersebut dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis model Fairclough. Hasil studi ini menunjukkan bahwa terdapat kedekatan idologi (kepentingan politik) pemilik *Media Indonesia* (Surya Paloh) yang sekaligus sebagai pendiri Partai Nasional Demokratik (Nasdem). Konstruksi pemberitaan *Media Indonesia* atas berita politik ini bertujuan untuk menciptakan citra positif Partai Nasdem sebagai partai baru guna menarik perhatian dan simpati para pemilih dalam kontestasi Pemilihan Umum Parlemen tahun 2014.

Penelitian berikutnya, dilakukan oleh Atmadja (2014) yang membahas tentang pengkonstruksian sosok Basuki Tjahya Purnama (Ahok) di media *online*. Penelitian ini bertujuan mengungkap isu yang ditonjolkan maupun yang dihilangkan oleh media *online* dalam rangka membingkai sosok Ahok sebagai pemimpin politik sekaligus pemerintahan yang beretnis Cina. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosok Ahok dicitrakan sebagai pemimpin yang bijaksana dan sudah terbiasa menghadapi isu SARA. Pembingkaiian ini menyiratkan bentuk dukungan media *online* terhadap Ahok berkaitan dengan persiapan dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta ketika Gubernur DKI saat itu (Jokowi) maju menjadi Calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2014. Yang terakhir, Kholik (2015) mengkaji pengkonstruksian berita politik

tentang pembingkai berita terpilihnya “Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan Anas Urbaningrum melalui Kongres Luar Biasa di Bali” yang dilakukan oleh harian umum Media Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilik Media Indonesia (Surya Paloh) berpengaruh besar terhadap keberpihakan pemberitaan media.

Studi pembingkai berita juga dilakukan untuk mengkonstruksi isu-isu nonpolitik (seperti, wacana korupsi, wacana terorisme, dan wacana keagamaan). Mardikantoro (2014) mengkaji konstruksi berita pada tajuk (anti) korupsi dalam surat kabar berbahasa Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengungkap sikap dan pandangan surat kabar terhadap kasus korupsi di Indonesia yang diwujudkan dalam wacana tajuk (anti) korupsi. Berdasarkan konstruksinya, berita wacana korupsi dibingkai oleh beberapa surat kabar dengan dua cara yang berbeda. Ada media yang memberikan dukungan (persetujuan) dan ada pula media yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap berita korupsi. Konstruksi yang mendukung pemberantasan korupsi diwujudkan berdasarkan fakta atas penangkapan tersangka koruptor, persidangan, dan vonis hukuman terhadap pelaku korupsi. Sebaliknya, konstruksi yang menyatakan ketidaksetujuan mengungkap beberapa fakta kegagalan dalam persidangan dan pembelaan terhadap pengusut kasus korupsi yang justru berujung masuk bui.

Penelitian berikutnya, dilakukan oleh Subagyo (2016) tentang representasi *frame* dalam latar belakang wacana tajuk terorisme di empat surat kabar nasional. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis wacana kritis model van Dijk. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ada *frame* yang terepresentasi secara sistematis yang dilakukan dengan cara menggunakan bagian latar belakang untuk mengungkapkan opini sesuai dengan masing-masing *frame* yang mereka pilih. Terakhir, Firman, Santoso, Dawud, dan Saryono (2016) melakukan studi tentang pengkonstruksian ideologi Jamaah Islam Liberal (JIL) dalam wacana keagamaan. Untuk membongkar konstruksi liberalisme dalam wacana keagamaan JIL, data dianalisis dengan teori analisis wacana kritis model Fairclough. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi ideologi

kebebasan dalam beragama diwujudkan dengan mendayagunakan fitur-fitur kebahasaan.

Fakta bahwa telah banyak orang yang melakukan studi tentang konstruksi (pembingkai) berita, baik wacana berita politik maupun nonpolitik, menunjukkan bahwa kajian pembingkai berita (*framing*) oleh media massa merupakan hal yang sangat penting dan menarik perhatian. Namun demikian, walaupun telah banyak dilakukan studi *framing* tentang berita politik dan nonpolitik, belum ada kajian yang membahas realitas politik yang kontroversial (karena menimbulkan pro dan kontra) sehingga menyita perhatian publik. Di samping itu, kajian konstruksi berita sebelumnya (Mayasari, Darmayanti, dan Riyanto 2013; Atmadja 2014; dan Kholik 2015), hanya membahas satu jenis konstruksi yang bersifat mendeskripsikan citra partai politik (Partai Nasdem), atau citra tokoh politik tertentu (Basuki Tjahaya Purnama dan Susilo Bambang Yudono). Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya, penelitian ini (pembingkai wacana berita politik PS sebagai Menhan) tidak hanya mengkaji media-media yang hanya cenderung memberikan dukungan (konstruksi mendukung), tetapi juga membahas media-media yang cenderung mengkritisi realitas politik PS menjadi Menhan. Selain itu, kajian ini juga berusaha mengungkap makna yang tersembunyi di balik konstruksi pemberitaan yang dilakukan oleh media *online*, baik yang mendukung maupun yang mengkritisnya. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan perhatian kepada pembaca bahwa realitas sosial yang sama dapat memberikan dampak yang berbeda jika dikonstruksi dengan bingkai yang berbeda. Oleh karena itu, para pembaca harus bijak dalam menyikapi setiap berita yang disajikan oleh media massa.

Berdasarkan paradigmanya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-kritis, yakni suatu jenis penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan, menafsirkan, dan mengkritisi data berdasarkan cara media *online* mengkonstruksi realitas pelantikan PS menjadi Menhan. Data penelitian berupa penggalan-penggalan teks yang ditafsirkan mengandung makna yang cenderung mendukung atau mengkritisi realitas politik PS menjadi Menhan. Pengumpulan data dilakukan dengan mencermati wacana berita politik pada media *online* di Indonesia

(bbc.com, kompas.com, kompasiana.com. cnbcindonesia.com, tempo.co, dan bali-tribunnews). Pemilihan data dilakukan dengan pembacaan secara kritis bagian-bagian teks yang ditafsirkan mengandung unsur mendukung maupun mengkritisi realitas berita politik tersebut.

Setelah diseleksi dan diurutkan, data dianalisis dengan pendekatan analisis wacana kritis model Fairclough (1996, 109–148) yang memandang wacana dari tiga dimensi (tahapan), yakni dimensi analisis teks (*text analysis*), dimensi praktik kewacanaan (*discourse practice*), dan dimensi praktik sosio-kultural (*socio-cultural practice*). Pada dimensi analisis teks, data disusun berdasarkan kepentingan analisis menurut fitur kebahasaan yang didayagunakan, seperti pilihan kosakata (diksi), penggunaan modalitas, dan pilihan bentuk kalimat (gramatika). Data yang sama dimungkinkan untuk dianalisis lebih dari satu kali, karena analisisnya dilakukan dari perspektif fitur kebahasaan yang berbeda. Untuk kemudahan analisis, data yang dianalisis ulang dengan perangkat kebahasaan yang berbeda diberi nomor yang berbeda (seolah-olah mereka dianggap sebagai data yang berbeda).

Pada tataran praktik kewacanaan, analisis diarahkan pada proses produksi teks, yakni kemunculan media *online*, tata kelola, dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemroduksian (konstruksi) teks yang mengarah pada motivasi pemilihan konstruksi berita (mendukung/mengkritisi) atas realitas politik (PS menjadi Menhan). Selanjutnya, pada tataran praktik sosio-kultural dikaji situasi sosial politik, kebiasaan praktik perpolitikan di Indonesia yang dapat memunculkan pilihan konstruksi berita (*frame*) yang berbeda atas realitas (politik) yang sama, yaitu PS menjadi Menhan.

## **B. KONSTRUKSI REALITAS POLITIK PS MENJADI MENHAN**

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap bingkai yang dikonstruksi untuk memberitakan realitas politik PS menjadi Menhan oleh beberapa media *online* di Indonesia. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu analisis teks, praktik kewacanaan, dan praktik sosio-kultural. Di bawah ini, disajikan masing-masing tahapan analisis dalam rangka mengungkap kecenderungan pengkonstruksian (mendukung atau meng-

kritisi) berita atas realitas politik PS menjadi Menhan oleh beberapa media *online* di Indonesia.

## 1. Analisis Teks

Bentuk konstruksi wacana berita politik oleh media *online* terkait dengan realitas politik PS menjadi Menhan dapat diungkap dengan cara menguraikan deskripsi kebahasaan (*text analysis*) yang dipilih dan diwujudkan melalui perangkat kebahasaan (*linguistic features*) yang digunakan untuk mengkonstruksi berita PS menjadi Menhan. Mengacu pada dimensi analisis teks, fitur-fitur kebahasaan yang dapat didayagunakan untuk mengkonstruksi berita, baik yang bersifat mendukung maupun mengkritisi, dapat berupa pilihan kosakata, modalitas gramatika, dan pilihan sumber berita (Fairclough 1996, 109–111).

### a. Konstruksi Mendukung

Hasil analisis teks (dimensi deskripsi kebahasaan) pada penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa media *online* (tempo.co, kompas.com, dan bbc.com) cenderung mendukung berita politik PS menjadi Menhan dengan menempatkan PS sebagai orang yang dibutuhkan Jokowi karena kompetensinya untuk mengisi jabatan Menhan di Kabinet Indonesia Maju periode 2019–2024. Bentuk dukungan tersebut dikonstruksi melalui pendayagunaan fitur kebahasaan, seperti pilihan kosakata (diksi) dan gramatika, sebagaimana dipaparkan dalam uraian di bawah ini.

#### 1) Konstruksi Mendukung melalui Pilihan Kosakata

Pada konstruksi mendukung, digunakan pilihan kosakata yang mendeskripsikan citra positif PS, sehingga ia diposisikan sebagai sosok yang (paling) tepat untuk mengisi jabatan Menhan. Secara bertahap, (kelompok) kosakata yang merujuk pada dukungan terhadap PS tersebut ditandai dengan cetak tebal. Perwujudan kosakata tersebut, misalnya direalisasikan dengan menampilkan kosakata “bisa menerima atau tidak”, “bukan orang yang mencari posisi (jabatan)”, dan “latar belakang PS” menerima tawaran (permintaan Jokowi tersebut), sebagaimana terlihat pada data di bawah ini.

- (1) “Awalnya belum ada kepastian apakah Pak Jokowi bisa **menerima atau tidak**. Pak Prabowo juga **bukan orang yang mencari posisi** kan?” kata

Sandiaga Uno yang dikutip dari majah Tempo. (Hantoro 2019). (Tempo.co, 28/10/19).

- (2) “Ketika dikonfirmasi, **Fadli Zon** mengakui dialah yang **mengusulkan** Prabowo menjadi Menteri Pertahanan.” (Hantoro 2019).
- (3) “Masuknya Prabowo ke kabinet Jokowi ini merupakan **permintaan dari Gerindra.**” (Hantoro 2019).
- (4) “**Seluruh kader Partai Gerindra**, sambung Andre (Rosiade) tegak lurus dengan keputusan Prabowo dan akan **mendukung** sepenuhnya keputusan tersebut.” (Bramasta 2019).

Data di atas mencitrakan bahwa PS tidak memiliki niatan untuk bergabung pada kabinet Jokowi. Hal ini ditunjukkan bahwa PS belum tentu mau menerima (tawaran menjadi Menhan) karena ia bukanlah orang yang mencari jabatan pada pemerintahan Jokowi (data 1). Usulan PS menjadi Menhan justru berasal dari petinggi Gerindra, Fadli Zon (data 2 dan 3), dan keputusan PS menerima tawaran untuk menjadi Menhan didukung seluruh kader partai Gerindra (data 4). Selanjutnya, pencitraan bahwa PS bukan orang yang memburu jabatan, tetapi ia adalah orang yang diperlukan oleh Jokowi karena kompetensinya dikonstruksi dengan kosakata “meminta” dan “diminta” sebagaimana terungkap dalam data di bawah ini.

- (5) “ ... Presiden Jokowi meminta (Prabowo) untuk memperkuat kabinet, dan keputusan Gerindra adalah **siap apabila diminta.**” (BBC News Indonesia 2019). (bbc.com, 21/10/2019).

Data tersebut menunjukkan bahwa PS dianggap sebagai orang yang tepat untuk mengisi jabatan Menhan, karena itu Jokowi meminta PS memperkuat kabinetnya dan Gerindra siap menerimanya (data 5). Hubungan keduanya “permintaan dan penerimaan tawaran” selanjutnya dikonstruksi oleh media dengan mendayagunakan kosakata yang merujuk pada alasan bahwa PS memang tokoh yang layak untuk mengisi jabatan Menhan. Alasan itu diwujudkan dengan pilihan kosakata, seperti konsep “pertahanan dan keamanan”, “*nation call*”, “prajurit”, “negarawan”, “kompetensi”, dan “latar belakang” sebagaimana tampak pada data berikut.

- (6) “Hal itu (tawaran Jokowi) tak lepas dari **konsep** yang diajukan Prabowo kepada Jokowi mulai soal kedaulatan energi, pangan, air hingga **pertahanan dan keamanan.**” (Bramasta 2019).
- (7) “Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengungkapkan **latar belakang** yang mendasari Prabowo Subianto, **menerima tawaran** menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju periode 2019–2024.” (Bramasta 2019).
- (8) “Nah karena **ditawari** (oleh Jokowi), ada *nation call* atau **panggilan negara** terhadap beliau, beliau ini kan **prajurit, patriot, negarawan**, ada panggilan negara terhadap beliau dan itu merupakan **kompetensi** beliau, sebagai **negarawan**, beliau menghilangkan egonya untuk **menerima panggilan negara** ini untuk *melakukan pengabdian kepada bangsa dan negara.*” ujarnya saat dihubungi Kompas.com. (Bramasta 2019).

Karena memiliki konsep tentang pertahanan keamanan yang baik, PS ditawarkan menjadi Menhan (data 6). Latar belakang PS yang merupakan orang yang tepat menerima tawaran Jokowi juga dipertegas oleh latar belakang PS (data 7) yang disampaikan oleh Wakil Sekjen Partai Gerindra, Andre Rosiade. Alasan lebih rinci bahwa PS pantas menerima tawaran Presiden Jokowi untuk mengisi jabatan Menhan dikonstruksi dengan adanya “*nation call*” atau “panggilan negara” terhadap diri PS. Sebagai warga negara yang baik, apalagi diasumsikan memiliki “kompetensi” dalam bidang “pertahanan dan keamanan”, seorang pejuang “patriot”, dan ia juga seorang “negarawan” sudah selayaknyalah kalau PS menerima tawaran itu. Bahkan, kesediaannya itu lebih dimaknai sebagai “pengabdian kepada bangsa dan negara” (data 8). Dengan kata lain, data-data tersebut menegaskan bahwa PS bukanlah orang yang mengejar jabatan tetapi orang yang dibutuhkan negara juga orang yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara (melakukan pengabdian kepada bangsa dan negara) karena ia merasa terpanggil atas dasar *nation call* tersebut.

Selanjutnya, konstruksi bahwa PS merupakan sosok yang diperlukan negara juga diwujudkan dengan kosakata yang berbeda untuk dirinya dengan untuk calon menteri yang lainnya ketika diminta menemui Presiden. Kepada PS digunakan kosakata “mengundang”, sementara untuk calon menteri yang lainnya digunakan kosakata “memanggil”. Secara literal, kedua kata kerja ini memiliki makna yang sama, tetapi secara pragmatis (kesantunan berbahasa), keduanya memiliki makna yang

berbeda. Kata “mengundang” menunjukkan bahwa orang yang diminta datang adalah sosok yang dihormati, yang diperlukan, atau bahkan diistimewakan, sebaliknya kata “memanggil” biasa digunakan oleh atasan terhadap bawahan. Pilihan kosakata tersebut tercermin dalam kutipan di bawah ini.

- (9) “Jokowi **mengundang** Prabowo datang ke Istana hari Senin (21/10) sekitar pukul 16.00 WIB saat Presiden Jokowi **memanggil** sejumlah orang yang disebut sebagai calon menteri.” (BBC News Indonesia 2019).

Konstruksi berita melalui pilihan kosakata (diksi) sebagaimana terlihat pada data di atas oleh media *online* (tempo.co, kompas.com, dan bbc.com) memperkuat fakta bahwa ketiga media ini cenderung memosisikan PS sebagai orang yang dibutuhkan negara dan bukan sosok yang mengejar jabatan (Menhan).

## 2) Konstruksi Medukung melalui Pilihan Kalimat Aktif/Pasif

Konstruksi mendukung juga diwujudkan dengan struktur gramatika berupa pilihan pola kalimat aktif dan pasif (Fairclough 1996, 124). Pilihan ini selalu dikaitkan dengan asal gagasan untuk posisi jabatan Menhan. Jika gagasan (keinginan) tersebut berasal dari Jokowi, kalimat aktif yang dipilih, sebaliknya jika gagasan itu berasal dari PS kalimat pasif yang digunakan.

- (10) “ ... Presiden Jokowi **meminta** (Prabowo) untuk memperkuat kabinet, dan keputusan Gerindra adalah siap apabila **diminta**.” (BBC News Indonesia 2019).
- (11) “Jokowi **mengundang** Prabowo datang ke Istana hari Senin (21/10) sekitar pukul 16.00 WIB saat Presiden Jokowi **memanggil** sejumlah orang yang disebut sebagai calon menteri.” (BBC News Indonesia 2019).

Data (10) merupakan kalimat majemuk setara yang memiliki dua klausa. Klausa pertama menggunakan kata kerja aktif “meminta” dan klausa kedua menggunakan kata kerja pasif “diminta”. Perbedaan jenis kalimat (aktif vs pasif) berkaitan dengan asal gagasan pengisian jabatan Menhan. Konstruksi dengan bentuk kalimat aktif menunjukkan bahwa Subjeklah (Jokowi) yang menginginkan PS menjadi Menhan (memper-

kuat Kabinet Indonesia Maju). Sebaliknya, dengan konstruksi kalimat pasif menunjukkan bahwa PS tidak mengajukan diri (mengejar jabatan) untuk menjadi Menhan. Konstruksi ini juga didukung oleh data (11), yakni Jokowi yang “mengundang” PS, bukan PS yang meminta untuk diundang. Selanjutnya, mari kita perhatikan kutipan data lainnya di bawah ini.

- (12) “Hal itu tak lepas dari konsep yang **diajukan** Prabowo kepada Jokowi mulai soal kedaulatan energi, pangan, air hingga pertahanan dan keamanan.” (Bramasta 2019).
- (13) “Nah, karena **ditawari**, ... **beliau** ... **menerima** ... ,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com. (Bramasta 2019).

Kata kerja “diajukan” (data 12) merupakan kata kerja pasif yang dapat dimaknai bahwa dalam kutipan tersebut, PS memiliki kompetensi dalam hal pertahanan dan keamanan sehingga beliau layak dan pantas untuk mengisi posisi Menhan. Bentuk kata kerja pasif lebih dipilih karena gagasan itu berasal dari PS, daripada bentuk aktif “mengajukan” untuk menghindari kesan bahwa PS membidik posisi tertentu dalam kabinet. Fakta ini juga didukung oleh (data 13) yang di dalamnya ada dua klausa yang mengandung hubungan sebab akibat, yaitu PS “ditawari” (bukan mengajukan diri, sebagai penyebab), maka PS menerima tawaran itu (sebagai akibat). Hal ini berimplikasi bahwa PS tidak mungkin menerima apabila ia tidak ditawari. Dengan kata lain, konstruksi ini lebih mempertegas bahwa PS adalah sosok yang dikehendaki oleh Jokowi untuk mengisi posisi Menhan bukan sosok yang mengincar jabatan Menhan. Melalui pilihan kosakata dan gramatika, ketiga media *online* tersebut menunjukkan kecenderungannya untuk memberikan dukungan terhadap realitas politik dilantiknya PS menjadi Menhan.

## **b. Konstruksi Mengkritisi**

Seperti halnya konstruksi mendukung, konstruksi mengkritisi juga dilakukan oleh beberapa media *online* (kompasiana.com, cnbc indonesia.com, dan bali-tribunnews.com) dengan mendayagunakan fitur kebahasaan, seperti pilihan kosakata, modalitas, dan gramatika (Fairclough 1996, 110–111).

## 1) Konstruksi Mengkritisi melalui Pilihan Kosakata

Beberapa kosakata sengaja dipilih oleh media *online* untuk mengkonstruksi sikap dan pandangannya yang mengkritisi realitas politik PS menjadi Menhan. Kosakata yang merujuk pada makna ketidaksetujuan media terhadap isu politik tersebut, misalnya diwujudkan dengan kosakata yang bermakna menyindir PS dengan ungkapan “bangga(nya)” seperti yang dilakukan oleh media *online* di bawah ini.

- (14) “**Bangganya** Prabowo Menjadi Menteri Pertahanan.” (Kompasiana.com 2019).
- (15) “ ... begitu **bangganya** beliau bisa menjadi salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju. Terlihat memang **kesemringahan** dari beliau.” (Kompasiana.com 2019).
- (16) “Pokoknya, Prabowo sudah **bangga** bisa masuk ke koalisi pemerintah dan **dapat kursi Menteri Pertahanan**.” (Kompasiana.com 2019).

Data (14) merupakan judul tajuk pada media *online* Kompasiana.com edisi 25 Oktober 2019. Pilihan kosakata “Bangganya” diulang pada kutipan data berikutnya, yakni “bangganya” (data 15), dan “bangga” (data 16). Bahkan, makna literal kosakata ini dipertegas dengan kecerahan wajah PS “kesemringahan” (data 15), dan “dapat kursi Menteri Pertahanan” (data 16). Namun jika dicermati lebih dalam, pilihan kosakata “bangga(nya)” merupakan sindirian atau ejekan terhadap PS karena ia masuk menjadi anggota Kabinet Jokowi. Selanjutnya, media *online* CNBCIndonesia.com mengkonstruksi berita tersebut dengan memilih kosakata “merapat” dan “datang (ke istana)”, sedangkan Bali-TribunNews memilih kosakata “menghadap”. Kelompok kosakata ini menyiratkan kecenderungan bahwa PS (Gerindra-lah) yang sengaja mendekati Jokowi untuk mendapatkan jabatan di Kabinet Indonesia Maju.

- (17) “Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto **merapat** ke Istana Negara pada Senin kemarin (21/10/2019), sehari setelah pelantikan Presiden-Wakil Presiden... .” (Siregar 2019). (cnbcindonesia.com, 22/10/19).
- (18) “Ia **datang** sekitar pukul 16.00 WIB, ... sebagaimana sejumlah tokoh lain yang juga turut datang ke istana.” (Siregar 2019).
- (19) “Saya baru saja **menghadap** Bapak Presiden yang baru kemarin dilantik” (“Sederet Kritik Untuk Prabowo Subianto Setelah

Menyanggupi Jadi Menteri Jokowi: Menjatuhkan Wibawa” 2019).  
(bali-tribunnews, 23/10/2019).

Lebih lanjut, ketidaksetujuan atas realitas politik dipilih (dan dilantiknya) PS menjadi Menhan dipertegas oleh media *online* bali-tribunnews.com yang mengkonstruksi realitas politik tersebut dengan pilihan kosakata “sederet (deretan) kritik”, dan “menjatuhkan wibawa”, sebagaimana tampak pada data di bawah ini.

- (20) “**Sederet Kritik** untuk Prabowo Subianto Setelah Menyanggupi Jadi Menteri Jokowi: **Menjatuhkan Wibawa.**” (“Sederet Kritik Untuk Prabowo Subianto Setelah Menyanggupi Jadi Menteri Jokowi: Menjatuhkan Wibawa” 2019).
- (21) “... berikut **deretan kritikan** yang diterima Prabowo Subianto usai diminta menjadi menteri.” (“Sederet Kritik Untuk Prabowo Subianto Setelah Menyanggupi Jadi Menteri Jokowi: Menjatuhkan Wibawa” 2019).

Sebagaimana data (14), data (20) juga merupakan judul tajuk yang dikonstruksi oleh bali-tribunnews.com untuk mengkritisi rencana pengangkatan PS menjadi Menhan. Pilihan kosakata “sederet kritik” dan “menjatuhkan wibawa” merupakan bukti bahwa media ini benar-benar menyatakan ketidaksetujuannya (mengkritisi) rencana pengangkatan PS menjadi Menhan. Sesuai dengan judulnya, wacana berita ini dipenuhi dengan pernyataan-pernyataan ketidaksetujuan oleh beberapa tokoh terhadap rencana pengangkatan PS sebagai Menhan yang direalisasikan dengan pilihan kosakata yang menunjukkan ketidaksetujuan, seperti “terbagi habis”, “dipermalukan”, “(me)rusak reputasi”, “menghancurkan Gerindra” dan “masyarakat kecewa”, juga “frustasi” dan “buruk bagi demokrasi” sebagaimana terparap pada data di bawah ini.

- (22) “Ia (Rocky Gerung) menilai seharusnya politik (**kekuasaan**) **tidak boleh terbagi habis** ... harus ada bagian yang menjadi watchdog (oposisi) agar tidak terjadi kelalaian dalam kekuasaan.” (“Sederet Kritik Untuk Prabowo Subianto Setelah Menyanggupi Jadi Menteri Jokowi: Menjatuhkan Wibawa” 2019).
- (23) “Kami mengingatkan Prabowo Subianto untuk hati-hati, jangan sampai **dipermalukan** di kemudian hari sehingga akan **rusak reputasi** beliau dan **menghancurkan Gerindra** tahun 2024 nanti,” kata Slamet Maarif saat dikonfirmasi. (“Sederet Kritik Untuk Prabowo Subianto Setelah Menyanggupi Jadi Menteri Jokowi: Menjatuhkan Wibawa” 2019).

- (24) “Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengungkapkan kekhawatirannya terkait Prabowo Subianto... (Itu jadi Menhan) Hak pribadi Pak Prabowo. Tapi saya khawatir ada banyak masyarakat yang **kecewa** dan akan **frustasi** yang itu **buruk bagi demokrasi**,” ujarnya kepada Tribunnews. (“Sederet Kritik Untuk Prabowo Subianto Setelah Menyanggupi Jadi Menteri Jokowi: Menjatuhkan Wibawa” 2019).

Selanjutnya, bentuk ketidaksetujuan PS menjadi Menhan oleh media *online* kompasiana.com dikonstruksi dengan kosakata (frasa) yang merujuk utamanya pada semakin melemahnya oposisi dan menghambat pelaksanaan demokrasi di Indonesia, sebagaimana tampak pada data di bawah ini.

- (25) “Ini artinya, oposisi sudah masuk kedalam pemerintahan... sehingga **mengurangi partai oposisi** yang berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang.” (Kompasiana.com 2019).
- (26) “... hal ini akan **menghambat demokrasi** kita. Pengkritik akan semakin lemah, karena **oposisinya berkurang**.” (Kompasiana.com 2019).

Ketidaksetujuan para tokoh tersebut jelas-jelas menyatakan bahwa realitas PS menjadi Menhan akan berdampak pada jumlah oposisi berkurang dan melemah (data 25), yang pada akhirnya terjadi pemerintahan yang terlalu kuat karena tanpa disertai partai penyeimbang yang mengontrol pemerintah (oposisi), dan situasi politik seperti ini akan “menghambat demokrasi” di negeri kita (data 26).

Konstruksi berita yang bernuansa penolakan terhadap PS berkoalisi dengan Jokowi masih terus berlanjut yang mengarah pada kritikan bahwa PS tidak lagi peka terhadap pendapat masyarakat dan tidak lagi memiliki rasa peduli terhadap partai-partai pendukung PS ketika pilpres 2014, sebagaimana terlihat pada data di bawah ini.

- (27) “Akan tetapi, sepertinya pendapat itu **tidak dihiraukan** Prabowo dan (dia) tetap masuk ke pemerintahan bersama Edhy Prabowo.” (Kompasiana.com 2019).
- (28) “Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Syamsuddin Haris, mengharapkan Prabowo seharusnya **menolak tawaran** Jokowi masuk dalam kabinet.” (“Sederet Kritik Untuk Prabowo Subianto Setelah Menyanggupi Jadi Menteri Jokowi: Menjatuhkan Wibawa” 2019).

- (29) “Dari lawan politik yang panas saat pemilu kemarin, kini semua sudah mencair bagaikan air mengalir. **Tidak ada rasa bersalah**, tidak ada rasa sebagai lawan politik dan **tidak ada sakit hati**.” (Kompasiana.com 2019).
- (30) “Novel (Bamukmin) menganggap keputusan Prabowo bisa **menyakiti** para pemilihnya di Aceh dan Sumatera Barat.” (“Sederet Kritik Untuk Prabowo Subianto Setelah Menyenggupi Jadi Menteri Jokowi: Menjatuhkan Wibawa” 2019).

Semua kosakata (frasa) yang dipilih dan digunakan untuk membangun konstruksi berita PS menjadi Menhan di atas cenderung mengkritisi keputusan PS karena ia ngotot masuk dalam Kabinet Jokowi. PS dicitrakan sebagai orang yang tidak mau mendengar pendapat atau saran pihak lain (data 27), posisi menteri yang ditawarkan Jokowi seharusnya ditolak, mengingat ia adalah satu-satunya rival Jokowi dalam Pilpres 2019 (data 28). Oleh karena itu, PS dikritik sebagai orang yang kurang tahu diri “tidak ada rasa bersalah”, “tidak ada sakit hati” (data 29), dan keputusannya dapat “menyakiti” para pemilihnya, terutama mereka yang berada di daerah Aceh dan Sumatra Barat (data 30) karena mayoritas dari mereka memilih pasangan PS dan Sandiaga Uno pada pilpres 2014 yang lalu.

## 2) Konstruksi Mengkritisi melalui Pilihan Modalitas

Salah satu fitur kebahasaan dalam analisis teks adalah modalitas (Fairclough 1996, 126–127). Modalitas adalah keterangan dalam kalimat yang menyatakan sikap pembicara terhadap hal yang diperbincangkan, yakni mengenai perbuatan, keadaan, peristiwa, atau sikap terhadap mitra tuturnya. Salah satu jenis modalitas adalah modalitas ekspresi yang berkaitan dengan otoritas penutur terhadap kebenaran dan evaluasi suatu realitas (Chaer 2012, 262). Modalitas ekspresi digunakan dalam teks untuk mengkonstruksi penilaian pengkritik terhadap suatu kebenaran (Santoso 2013, 196). Media yang mengkritisi memberikan kritik terhadap PS berkaitan dengan kebijakan politik yang ia ambil untuk menjadi Menhan. Keputusan PS dianggap tidak sejalan atau berkebalikan dengan yang diharapkan oleh pengkritik. Oleh karena itu, banyak orang yang mengandaikan (mengharap) sesuatu terhadap PS, tetapi harapan itu tidak terpenuhi. Konstruksi itu dapat dibongkar melalui data di bawah ini.

- (31) “ ... Prabowo **seharusnya** menolak tawaran Jokowi masuk dalam kabinet.” (“Sederet Kritik Untuk Prabowo Subianto Setelah Menyanggupi Jadi Menteri Jokowi: Menjatuhkan Wibawa” 2019). (bali-tribunnews.com, 23/10/2019).
- (32) “**Sejatinya** Probowo wajib menjadi oposisi saja, dengan begitu Prabowo sangat terhormat dan disegani baik kawan maupun lawan imbuhnya.” (“Sederet Kritik Untuk Prabowo Subianto Setelah Menyanggupi Jadi Menteri Jokowi: Menjatuhkan Wibawa” 2019).
- (33) “Novel Bamukmin menilai, **sebaiknya** Prabowo tetap menjadi oposisi agar mendapat kehormatan dari pendukungnya saat Pilpres 2019.” (“Sederet Kritik Untuk Prabowo Subianto Setelah Menyanggupi Jadi Menteri Jokowi: Menjatuhkan Wibawa” 2019).
- (34) “**Semestinya** Pak Prabowo dan teman-teman menolak ajakan itu,” tandas Syamsuddin Haris. (“Sederet Kritik Untuk Prabowo Subianto Setelah Menyanggupi Jadi Menteri Jokowi: Menjatuhkan Wibawa” 2019).
- (35) “Tetapi **sebenarnya** saya (Rocky gerung) mau dia di luar koalisi karena saya tau dia punya kemampuan untuk mengkonsepsikan sesuatu.” (“Sederet Kritik Untuk Prabowo Subianto Setelah Menyanggupi Jadi Menteri Jokowi: Menjatuhkan Wibawa” 2019).

Semua data di atas (31–35) mengandung unsur modalitas (bagian kata yang tebal). Dengan modalitas “seharusnya” (data 31), “sejatinya” (data 32), “sebaiknya” (data 33), “semestinya” (34), dan “sebenarnya” (data 35), pengritik mengharapkan PS tidak masuk menjadi anggota Kabinet Jokowi. Kenyataannya, (yang diputuskan PS) berlawanan dengan yang mereka harapkan, yakni PS tetap bergabung dengan Jokowi. Konstruksi ini menunjukkan bentuk ketidaksetujuan media-media tersebut terhadap realitas politik bergabungnya PS menjadi Menhan pada Kabinet Jokowi.

### 3) Konstruksi Mengkritisi melalui Pilihan Gramatika (Bentuk Aktif)

Selain kosakata dan modalitas, fitur kebahasaan yang dapat juga digunakan dalam mengkonstruksi berita adalah struktur gramatika (Fairclough 1996, 124–125). Jika dalam konstruksi mendukung bentuk kalimat aktif banyak ditujukan untuk Jokowi, dalam konstruksi mengkritisi konstruksi aktif banyak ditujukan kepada PS, sehingga ia lebih diposisikan sebagai inisiator (setidaknya, ia punya kesempatan untuk

menolaknyanya). Hal ini juga dapat dimaknai bahwa PS-lah yang lebih berinisiatif untuk mendekati Jokowi agar dirinya dapat dipilih untuk menduduki posisi Menhan.

- (36) "... Prabowo seharusnya **menolak** tawaran Jokowi masuk dalam kabinet." ("Sederet Kritik Untuk Prabowo Subianto Setelah Menyanggupi Jadi Menteri Jokowi: Menjatuhkan Wibawa" 2019). (bali-tribunnews.com, 23/10/2019).
- (37) "Sebab itulah,... seharusnya Prabowo **tidak** usah **menerima** ajakan Jokowi untuk masuk pemerintah." (Kompasiana.com 2019).
- (38) "Novel (Bamukmin) menganggap keputusan Prabowo bisa **menyakiti** para pemilihnya di Aceh dan Sumatera Barat." ("Sederet Kritik Untuk Prabowo Subianto Setelah Menyanggupi Jadi Menteri Jokowi: Menjatuhkan Wibawa" 2019).

Dalam konstruksi berita seperti yang tersaji pada data (36–38), kedua media massa (tribunnews.com dan Kompasiana.com) memilih bentuk aktif yang menempatkan PS sebagai aktor atas realitas politik tersebut. Dalam konstruksi ini, digunakan kata kerja aktif yang berbeda tetapi merujuk pada makna yang kurang lebih sama (menolak = tidak menerima, data 36 dan 37) dan sebagai dampak dari itu adalah "menyakiti para pemilihnya" (data 38). Seperti yang kita ketahui bahwa pasangan PS dan Sandiaga Uno menang mutlak pada pilpres 2014 di dua daerah tersebut.

## 2. Praktik Kewacanaan (*Discourse Practice*)

Dimensi kedua dalam analisis wacana kritis model Fairclough (1996, 141) adalah analisis dimensi praktik kewacanaan (*discourse practice*). Dalam praktik kewacanaan, hal yang perlu diamati adalah aspek produksi dan konsumsi teks (Mayasari, Darmayanti, dan Riyanto 2013, 218). Terkait dengan teks (wacana) berita politik PS jadi Menhan yang diproduksi oleh media *online*, hal yang perlu dicermati antara lain latar belakang media *online* dan sistem tata kelolanya (cara memilih dan menyajikan berita). Kelahiran media *online* sebenarnya dipicu oleh munculnya perubahan teknologi yang berdampak pada perubahan besar gaya hidup masyarakat. Dengan perubahan teknologi yang serba cepat, gaya hidup masyarakat juga dituntut menjadi serba cepat dan instan. Oleh karena itu, mereka tidak lagi mempunyai banyak waktu luang (termasuk waktu untuk menonton

TV, mendengarkan radio, dan membaca koran guna mendapatkan berita yang diperlukan). Peluang inilah yang kemudian ditangkap oleh para pemilik media konvensional, yang akhirnya mereka mulai membuat afiliasi bagi medianya. Inilah yang menyebabkan munculnya media *online* yang merupakan korporasi media cetak maupun media penyiaran yang telah ada sebelumnya (misalnya, [kompas.com](http://kompas.com), [tempo.co](http://tempo.co)).

Dalam manajemen pengelolaan, media *online* harus menyesuaikan diri dengan selera pasar (masyarakat) dan nilai-nilai yang mereka anut, karena hal ini berkaitan dengan sumber pendapatan yang menghidupi media tersebut (faktor ekonomi). Oleh karena itu, pengkonstruksian suatu berita termasuk berita politik PS menjadi Menhan tidak terlepas dari keberpihakan media *online* terhadap realitas sosial tersebut, terutama berkaitan dengan upaya untuk menaikkan rating baca yang dapat berpengaruh terhadap sumber pendapat mereka.

Kelompok media *online* ([tempo.co](http://tempo.co), [kompas.com](http://kompas.com), dan [bbc.com](http://bbc.com)) yang mengkonstruksi dukungan terhadap realitas PS menjadi Menhan dapat kita telisik bahwa mereka sengaja memilih tokoh-tokoh yang dijadikan sumber beritanya adalah orang-orang yang dianggap dekat dengan PS atau dekat dengan Partai Gerindra, bahkan PS sendiri. [Tempo.co](http://Tempo.co), misalnya mengutip Sandiaga Uno dan Fadli Zon sebagai sumber berita. [Kompas.com](http://Kompas.com) memberikan dukungan realitas pelantikan PS menjadi Menhan dengan mengambil sumber berita dari tokoh Gerindra, Andre Rosiande, yang menjabat Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Partai Gerindra. Sebagai seorang Wasekjen, ia akan sangat berhati-hati dalam memberikan pendapatnya terkait dengan realitas politik yang melibatkan ketua umumnya. Ia selalu berusaha membela dan mendukung PS menjadi Menhan. Pilihan konstruksi ini dapat dipahami karena dengan mendukung realitas tersebut diharapkan ke depannya mereka berharap akan dapat menjalin komunikasi (pemberitaan) yang lebih baik dengan pihak pemerintah terutama dalam mengakses berita.

Sebaliknya, banyak media masa *online* memberikan konstruksi kritis terhadap realitas politik PS menjadi Menhan. Konstruksi ini misalnya disajikan oleh [kompasiana.com](http://kompasiana.com)., [cnbcindonesia.com](http://cnbcindonesia.com), dan [bali-tribunnews](http://bali-tribunnews). Media-media ini umumnya menyitir pendapat para tokoh yang kecewa dengan keputusan PS bergabung dengan Jokowi, seperti

Rocky Gerung, Slamet Maarif, Mardani Ali Sera, Syamsuddin Haris, dan Novel Bamukmin. Terlepas dari itu, motivasi konstruksi mengkritisi realitas PS menjadi Menhan oleh beberapa media massa tersebut adalah ingin mendapat simpati dari para pembaca yang kecewa dengan realitas politik ini. Mereka (para pendukung) utamanya adalah teman-teman PS dari partai lain (PKS, Demokrat, dan PAN) yang berjuang bersama untuk mendukung dan memenangkan pasangan PS dan Sandiaga Uno dalam Pilpres 2014. Di samping kelompok pendukung PS dalam pilpres, kekecewaan itu juga datang dari beberapa pendukung Jokowi yang bernama Pro Jokowi (PROJO). Pilihan mengkritisi ini dapat pula ditafsirkan berkaitan dengan pangsa pasar atau berkaitan dengan upaya media untuk menaikkan *rating* baca para pelanggan media masa (*online*) yang bersangkutan. Dengan semakin tinggi ketertarikan untuk membaca berita tersebut, semakin ramai iklan yang mendukungnya dan semakin besar pula keuntungan perusahaan (media) yang dapat diraupnya.

### 3. Praktik Sosio-Kultural (*Socio-cultural Practice*)

Dimensi ketiga dalam analisis wacana kritis model Fairclough adalah analisis praktik sosio-kultural (Fairclough 1996, 146–147). Analisis ini didasarkan pada konteks sosial yang terjadi di luar media yang berpengaruh terhadap cara suatu wacana dikemas oleh media. Fairclough (1992, 67) menyatakan bahwa praktik sosio-kultural bisa memiliki berbagai orientasi, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologi.

Relaitas sosial tentang pro kontra atas peristiwa politik “PS menjadi Menhan” tidak dapat dipisahkan dari praktik sosio-kultural perpolitikan di Indonesia. Dalam hal ini, ada golongan yang berpendapat bahwa perlu ada kekuatan penyeimbang “kelompok oposisi” di DPR terhadap kekuasaan pemerintah, tetapi ada pula golongan yang berpendapat bahwa di Indonesia tidak dikenal istilah oposisi dalam DPR. Hal inilah yang dapat menimbulkan sikap pro dan kontra pengangkatan PS sebagai Menhan.

Kelompok (media) yang bersikap mengkritisi realitas politik PS menjadi Menhan beralih bahwa kekuatan penyeimbang (oposisi) untuk mengontrol kekuasaan pemerintahan mutlak diperlukan di negara demokrasi agar tidak terjadi penggunaan kekuasaan yang berlebihan yang dapat berdampak pada penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Mengacu pada dua periode pilpres secara langsung (2014 dan 2019), PS dan Jokowi merupakan dua kandidat presiden yang memiliki pendukung sama kuat, sehingga baik pada pilpres tahun 2014 maupun 2019 masing-masing mengklaim dirinya mendapatkan suara lebih banyak daripada rivalnya. Di samping merasa memperoleh suara yang lebih banyak, pihak PS juga mengklaim bahwa pihak Jokowi melakukan kecurangan dalam pilpres yang mereka nyatakan sebagai suatu tindakan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Bahkan hujatan-hujatan atas tindakan yang dianggap tidak terpuji juga sering dilontarkan tim PS dalam berbagai kesempatan. Karena merasa mendapatkan suara yang lebih banyak dan merasa dicurangi dalam pelaksanaan pilpres, pihak PS membawa kasus hasil pilpres dan tindakan kecurangan pada pilpres tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

Kenyataan tersebut membuktikan bahwa PS merupakan sosok yang sangat kuat, sehingga PS dan Partai Gerindra (serta partai-partai pendukungnya) diharapkan akan menjadi kekuatan penyeimbang yang ideal dalam demokrasi di Indonesia. Harapan itu musnah ketika PS memutuskan bergabung dengan kabinet Jokowi jilid dua, sebagai Menhan. Memang menganut asas sistem politik di Indonesia, pengawasan pemerintah (presiden) dilakukan oleh DPR. Secara teori, sebenarnya tidak ada masalah PS masuk menjadi anggota kabinet. Kekhawatiran muncul karena ia masih berstatus (merangkap jabatan) sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Secara kultural dalam praktik perpolitikan di Indonesia, ketua umum partai memiliki kekuasaan penuh terhadap anggota DPR yang berasal dari partainya. Ketua umum partai masih berkuasa untuk mengontrol sikap anggota DPR dari partainya (yang tidak sejalan dengan kebijakan partai). Hal inilah yang dikhawatirkan oleh pihak (media) yang mengkritisi PS menjadi Menhan, yakni anggota DPR dari partai Gerindra (dan juga PKS) yang awalnya sangat vokal dan kritis terhadap pemerintah ditengarai akan melemah karena mereka takut mendapat teguran (sanksi) dari ketua umumnya, bahkan mereka bisa di “recall” atau dilengserkan dari anggota DPR.

Bergabungnya PS ke Kabinet Jokowi juga dianggap akan melukai perasaan para pemilihnya dan juga mengecewakan partai-partai pendukungnya (sekalipun hal itu tidak diungkapkan secara langsung dan

gamblang) karena dulu mereka berjuang bersama-sama dan berharap PS yang akan menjadi presiden, atau mereka akan menjadi kekuatan penyeimbang (oposisi) di luar pemerintah. Apalagi partai pendukung PS, seperti PKS, juga getol mengkritisi pemerintahan Jokowi, termasuk menghujatnya. Semua itu dilupakan begitu saja oleh PS dengan kesediaannya bergabung ke dalam Kabinet Jokowi.

Sebaliknya, kelompok media *online* yang mendukung realitas pilihan politik PS menjadi Menhan beralasan bahwa demokrasi di Indonesia tidak menganut sistem oposisi. Mereka yang mendukung pilihan politik PS bergabung dengan Jokowi berpendapat bahwa kalangan nonparpol dapat berfungsi sebagai kelompok pengkritik pemerintah (oposisi). Golongan ini dapat berasal dari organisasi massa atau masyarakat secara keseluruhan. Bukankah, kekuasaan sesungguhnya berada di tangan rakyat.

Di Era Orde Baru, DPR juga hanya diisi oleh kekuatan yang pro pemerintah (tidak ada partai oposisi). Namun, kekuatan rakyat (gerakan reformasi) tahun 1998 mampu menjatuhkan Presiden Suharto dari posisinya sebagai presiden. Pihak ini berkeyakinan bahwa oposisi dapat muncul kapan saja (secara tiba-tiba), baik ada partai oposisi (di DPR) maupun tidak. Mereka berpendapat apabila situasi perpolitikan di Indonesia tidak kondusif sebagai dampak pemerintah yang tidak memperhatikan kepentingan rakyat dan keutuhan bangsa serta negara, maka akan muncul oposisi yang mengkritisi pemerintah. Oleh karena itu, kelompok ini berpendapat bahwa sah-sah saja PS bergabung dengan Jokowi. Apalagi sering ada semboyan dalam kultur politik di Indonesia, yaitu “tidak ada kawan atau lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan atau tujuan yang abadi”, sehingga untuk mencapai suatu tujuan (politik) tidak jarang seorang politisi harus berganti kawan atau lawan, atau berganti partai.

## C. SIMPULAN

Berdasarkan analisis teks, realitas berita politik PS menjadi Menhan dikonstruksi oleh media *online* ke dalam dua sikap dan pandangan yang berbeda, yakni sikap mendukung dan sikap mengkritisi dengan mendayagunakan perangkat kebahasaan yang berupa pilihan kosakata,

modalitas, gramatika, dan pilihan narasumber berita. Konstruksi berita yang cenderung mendukung berupaya mencitrakan PS sebagai orang yang dibutuhkan negara (Presiden Jokowi) karena ia memiliki kompetensi untuk mengisi jabatan Menhan. Melalui konstruksi mendukung, PS dicitrakan sebagai tokoh yang memiliki kualitas yang tepat untuk mengisi jabatan Menhan. Konstruksi berita yang mendukung dilakukan oleh media *online*: tempo.co, kompas.com, dan bbc.com.

Sebaliknya, media *online* lainnya (seperti, cnbcindonesia.com, kompasiana.com, dan bali-tribunnews) mengkonstruksi berita politik PS menjadi Menhan dengan kecenderungan mengkritisi atau menyatakan ketidaksetujuannya dengan memosisikan PS sebagai seorang yang sengaja mendekati Jokowi karena menginginkan jabatan tertentu. Sikap PS ini memperlemah partai oposisi di DPR, mengecewakan (partai pendukung) PS dalam Pilpres 2014, dan juga dapat menghambat iklim demokrasi.

Pada dasarnya, pilihan sikap (keberpihakan) media *online* dalam suatu pemberitaan (termasuk realitas politik PS menjadi Menhan) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ideologi media massa yang mengkonstruksinya, pangsa pasar (pembaca), dan kebiasaan praktik perpolitikan di Indonesia. Studi ini menyiratkan bahwa realitas yang sama dapat bermakna berbeda ketika realitas tersebut dikemas dalam konstruksi berita yang tidak sama. Para pembaca berita diharapkan tidak menerima begitu saja atas berita yang dibacanya tetapi mereka harus lebih bijak dan kritis dengan memperhatikan konstruksi lain atas berita tersebut yang diberitakan oleh media (*online*) lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, Xena Levina. 2014. "Analisis Framing terhadap Pemberitaan Sosok Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Media Online." *Jurnal e-Komunikasi* 2 (1). <http://publication.petra.ac.id/index.php/ilmu-komunikasi/article/view/1744>.
- BBC News Indonesia*. 2019. "Prabowo Subianto Sanggupi Jadi Menteri Jokowi, Oposisi 'Makin Lemah,'" 21 Oktober 2019, bag. Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50120201>.
- Bramasta, Dandy Bayu. 2019. "Prabowo Jadi Menteri Pertahanan, Gerindra: Nation Call." KOMPAS.com. 25 Oktober 2019.

- <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/25/082500065/prabowo-jadi-menteri-pertahanan-gerindra--nation-call>.
- Chaer, Abdul. 2012. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fairclough, Norman. 1992. *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press.
- . 1996. *Language and Power*. London and New York: Longman.
- . 2010. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Longman.
- Firman, Anang Santoso, dan Dawud. 2016. “Konstruksi Ideologi Dalam Wacana Keagamaan Jaringan Islam Liberal (JIL).” *LITERA* 15 (1). <https://doi.org/10.21831/ltr.v15i1.9764>.
- Hantoro, Juli. 2019. “Ide Prabowo Jadi Menteri Pertahanan Muncul Dari Fadli Zon.” *Tempo.Co*. 28 Oktober 2019. <https://nasional.tempo.co/read/1265212/ide-prabowo-jadi-menteri-pertahanan-muncul-dari-fadli-zon>.
- Kholik, Idham. 2015. “Bingkai Berita Media Indonesia Tentang Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (Analisis Framing Pada Pemberitaan Media Indonesia).” *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 1 (02). <https://doi.org/10.30813/bricolage.v1i02.1634>.
- Kompasiana.com. 2019. “Bangganya Prabowo Menjadi Menteri Pertahanan.” *KOMPASIANA*. 25 Oktober 2019. <https://www.kompasiana.com/juandimanullang/5db285e00d82301d8b553ed4/bangganya-prabowo-menjadi-menteri-pertahanan>.
- Leech, Geoffrey N. 2014. *Principles of Pragmatics*. New York: Routledge.
- Mardikantoro, Hari Bakti. 2014. “Analisis Wacana Kritis Pada Tajuk (Anti) Korupsi Di Surat Kabar Berbahasa Indonesia.” *LITERA* 13 (2). <https://doi.org/10.21831/ltr.v13i2.2576>.
- Mayasari, Nani Darmayanti, dan Sugeng Riyanto. 2013. “Critical Discourse Analysis of Reporting on ‘Saweran for KPK Building’ in Media Indonesia Daily Newspaper.” *International Journal of Linguistics* 5 (4): 213–24. <https://doi.org/10.5296/ijl.v5i4.4198>.
- Romli, Asep Syamsul M. 2015. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.

<https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/143717/jurnalistik-online-panduan-mengelola-media-online.html>.

Santoso, Anang. 2013. *Bahasa Politik Pasca Orde Baru*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

“Sederet Kritik Untuk Prabowo Subianto Setelah Menyanggupi Jadi Menteri Jokowi: Menjatuhkan Wibawa.” 2019. *Tribun Bali*. 23 Oktober 2019. <https://bali.tribunnews.com/2019/10/23/sederet-kritik-untuk-prabowo-subianto-setelah-menyanggupi-jadi-menteri-jokowi-menjatuhkan-wibawa>.

Siregar, Efrem Limsan. 2019. “Jadi Menteri, Prabowo Diminta Jokowi Urus Pertahanan RI.” *CNBC Indonesia*. 22 Oktober 2019. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191022084833-4-108882/jadi-menteri-prabowo-diminta-jokowi-urus-pertahanan-ri>.

Subagyo, P. Ari. 2016. “Representasi Frame Dalam Latar Belakang Wacana Tajuk Tentang Terorisme.” *LITERA* 15 (1). <https://doi.org/10.21831/ltr.v15i1.9777>.

Sudaryanto dan Sulistyono. 1997. “Ragam Bahasa Jurnalistik dan Pengajaran Bahasa Indonesia.” Dalam *Penggunaan Bahasa Jurnalistik pada Media Massa: Pendekatan Empiris*, 65–75. Semarang: Citra Almamater.

Sukarno. 2013. “Retorika Persuasi sebagai Upaya Mempengaruhi Jamaah pada Teks Khotbah Jumat.” *Jurnal Humaniora* 25 (2): 215–27. <https://doi.org/10.22146/jh.2364>.